

PENGARUH BELANJA MODAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Rudy Badrudin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: rudy@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

This research analyzed about the influential of the Capital Expenditure and Economic Growth to the society-district welfare of Province Central Java based on the data of year 2001 to 2005. Those districts in Province Central Java was chosen as a research unit of analysis because the province was one of the provinces that didn't experience any expansion by the year of 2001, so that its territory originality still able to be maintained since the effectuation of regional autonomy on January 1st, 2001. The year of 2001 to 2005 were chosen as the research period, because the period was the first 5 years implementation of regional autonomy in Indonesia. By using the regression analysis ($\alpha = 5\%$), found out that the Capital Expenditure didn't influence the society-district welfare of Province Central Java; the Economic Growth was significantly influenced the society-district welfare of Province Central Java; and the Capital Expenditure and Economic Growth were significantly influenced the society-district welfare of Province Central Java.

Keywords: capital expenditure, economic growth, society district welfare

PENDAHULUAN

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah tersebut harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan daerah telah dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sistesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wi-layah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi

dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah provinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan $\frac{3}{4}$ perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi $\frac{3}{4}$ kecuali di bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang akan dengan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kewenangan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Menurut Abdullah dan Asmara (2007:4) dan Kuncoro (2008:1), terjadinya misalokasi dalam anggaran belanja pemerintah terkait dengan perilaku oportunistik politisi dan aparat pemerintah. Besarnya kewenangan

legislatif dalam proses penyusunan anggaran membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Secara empiris juga ditemukan adanya *flypaper effect*, yakni adanya perbedaan dalam pola pengeluaran untuk pendapatan dari usaha sendiri dengan pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti transfer). Studi Abdullah dan Asmara menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah dan Asmara menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Penelitian Abdullah dan Asmara (2007:20) menunjukkan bahwa perubahan PAD (PPAD) berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik legislatif (OL) pada derajat signifikansi 5%. Hal ini bermakna bahwa penurunan anggaran pendidikan dan kesehatan menunjukkan oportunisme legislatif, begitu pula kenaikan anggaran untuk infrastruktur dan legislatif. Pembuktian secara empiris hipotesis ini merupakan konfirmasi atas dugaan apriori adanya upaya legislatif mempengaruhi keputusan alokasi anggaran belanja di APBD untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Hipotesis bahwa perubahan pendapatan sendiri berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik legislatif, juga tidak dapat ditolak. Bahwa PAD merupakan “jalan” bagi legislatif untuk

melakukan *political corruption* dalam kerangka regulasi yang sah dapat dibuktikan ketika perubahan atau kenaikan anggaran atau target PAD digunakan sebagai dasar untuk melakukan alokasi tambahan belanja. Meski secara keseluruhan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD tidak besar, kenaikan yang terjadi dapat memberikan peluang bagi legislatif untuk pemenuhan kepentingannya, terutama kepentingan politis seperti untuk menepati janji kampanye dan untuk terpilih kembali pada periode berikutnya. PAD pada akhirnya menjadi buah simalakama ketika masyarakat dibebani dengan pajak dan retribusi yang tinggi sementara pengalokasiannya hanya menguntungkan pihak atau kelompok tertentu.

Analisis atas pengaruh jenis dan letak pemerintah daerah perlu untuk memberikan bukti bahwa intensitas oportunistik legislatif berkaitan dengan status daerah sebagai kota atau kabupaten dan berada di pulau Jawa/Bali atau di luar pulau Jawa/Bali. Pandangan bahwa perilaku oportunistik legislatif di luar Jawa/Bali lebih besar dari pada di Jawa/Bali bersumber dari anggapan bahwa *social control* dari *stakeholders* di luar pemerintahan terhadap pelaksanaan layanan publik dan perilaku anggota legislatif tidak sebaik di Jawa/Bali. Misalnya, di Jawa/Bali gerakan mahasiswa dan pers sangat efektif dalam mengungkap berbagai penyimpangan anggaran untuk mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai laporan tentang korupsi dan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Hal yang sama juga terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota, dimana perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula. Hasil pengujian menunjukkan bahwa besaran nilai t untuk variabel JPEM dan LPEM tidak signifikan secara statistik. Hal ini bermakna bahwa jenis pemerintah dan letak pemerintah tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislatif. Sementara variabel PPAD, sama seperti dalam regresi sebelumnya, berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik legislatif pada signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perilaku oportunistik yang diperlihatkan legislatif dalam proses penyusunan anggaran tidak berbeda antara legislatif di kota dengan di kabupaten dan antara legislatif di Jawa/Bali dengan di luar Jawa/Bali. Artinya, oportunistik melalui anggaran, apakah disebut *rent-seeking* ataupun korupsi, dilakukan oleh

legislatif di seluruh Indonesia, baik di Jawa/Bali maupun di luar Jawa/Bali, baik oleh legislatif di pemerintahan kabupaten maupun di pemerintahan kota.

Penelitian Bank Dunia (2005:17) menunjukkan bahwa format APBD baru belum sepenuhnya dijalankan di semua kabupaten/kota hingga 2004. Selain memperkenalkan konsep anggaran berbasis kinerja, Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 juga mengakibatkan perubahan format APBD yang menggunakan konsep anggaran terpadu. Perubahan utama adalah pos belanja daerah tidak lagi dibedakan antara belanja rutin dan pembangunan, melainkan antara belanja aparatur dan belanja publik. Selain itu pinjaman dan arus pembiayaan lain serta cadangan pemerintah kini dibuat terpisah. Jika penanganan atas sisi pendapatan tidak terlalu banyak berubah, ada sejumlah perubahan pada sisi pengeluaran yang mempengaruhi APBD secara mendasar. Penggolongan antara belanja aparatur pemerintah dan layanan publik didasarkan pada siapa yang menikmati. Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat umum akan dicatat sebagai belanja publik. Definisi yang tidak jelas ini mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat interpretasi sendiri atas jenis pengeluaran sehingga perbandingan belanja daerah antar kabupaten/kota menjadi sulit.

Sebelum adanya Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, setiap unit kerja menyusun dokumen anggaran masing-masing. Permohonan anggaran diajukan secara terpisah dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk anggaran rutin dan Daftar Isian Proyek (DIP) untuk anggaran pembangunan. Dalam struktur baru, seluruh unit kerja kini hanya menggunakan satu dokumen anggaran (Dokumen Anggaran Satuan Kerja/DASK). Secara umum, DIK mencakup seluruh pengeluaran rutin, setara dengan kategori administrasi umum dalam DASK yang mencakup belanja pegawai dan publik. DIP mencakup seluruh pengeluaran proyek, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Dalam format anggaran baru, pengeluaran untuk menambah modal dicatat di bawah belanja modal, sementara belanja operasional proyek (kini disebut kegiatan) dicatat di bawah belanja operasi dan pemeliharaan. Hal ini membuat perbandingan belanja pembangunan dengan pos-pos terkait dalam format yang baru menjadi bermasalah. Format yang baru bertujuan untuk bergeser dari

pembedaan rutin/pembangunan ke pendekatan yang lebih berorientasi pada program (Suhab, 2004:115).

Belanja Modal sebagai komponen Belanja Pembangunan pada Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia. Dengan demikian, Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat akan ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai Indikator Pembangunan Manusia (IPM) (Arsyad, 2004:38). IPM merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Adi (2005) melakukan penelitian tentang Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan studi kasus di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua daerah benar-benar siap memasuki desentralisasi fiskal. Data awal dari temuan Adi menunjukkan ada 46% daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata. Faktor inilah yang diindikasikan sebagai alasan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang positif antardaerah setelah

memasuki era desentralisasi fiskal. Namun demikian, apabila dilakukan analisis secara parsial, perbedaan yang terjadi hanya beberapa daerah saja. Bukti empiris menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang diindikasikan kurang siap menghadapi desentralisasi fiskal. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, alokasi belanja pembangunan harus dilakukan secara cermat. Belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan PAD relatif terjamin, namun demikian yang paling diuntungkan justru pihak swasta, dalam hal ini investor (para pemilik modal). Belanja ini hendaknya juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata (mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi).

Suryanto meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kajian Teoritis dan Aplikasi Anggaran (2005). Menurut Suryanto (2005:13), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan yang didasarkan temuan terdahulu maupun gambaran umum yang dialami di wilayah penelitian. Gambaran terhadap kondisi desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian Suryanto menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya kesenjangan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Suryanto dkk., 2005:67).

Sasana (2009) meneliti tentang Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan populasi semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 dengan analisis jalur. Simpulan hasil penelitian Sasana adalah 1) Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah; 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh

signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 4) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 5) Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah; dan 6) Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal variabel, lokasi, obyek, waktu, dan alat analisis dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan data panel (*polled data*) tahun 2001-2005 di semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilihnya semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2001 sebagai awal dimulainya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sampai dengan sekarang tahun 2011 merupakan provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah di samping Provinsi DKI, Provinsi DIY, dan Provinsi Bali.

Berdasarkan penjelasan tentang implimentasi otonomi daerah di Indonesia dengan variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi serta hasil yang dipengaruhi yaitu variabel kesejahteraan masyarakat maka mengindikasikan adanya perbedaan antara teori dan konsep mengenai otonomi daerah. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal pada APBD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang yang menjelaskan tentang pengaruh belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah maka permasalahan penelitian adalah 1) Apakah belanja modal pada APBD berpengaruh

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?; 2) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?; dan 3) Apakah belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pada APBD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; dan 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Menurut Musgrave and Musgrave (1991:2) dan Fuad (2005:24), pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian dan berfungsi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat yang layak. Fungsi pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mangkoesobroto, 1988:2): 1) Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. Dilihat dari fungsi alokasi, suatu barang publik tidak dapat disediakan melalui sistem pasar yang melalui transaksi antara konsumen dan produsen secara individu; 2) Fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Dilihat dari fungsi distribusi, fungsi distribusi mempunyai sifat yang lebih sulit dipecahkan dibanding fungsi alokasi dan merupakan permasalahan utama dalam penentuan kebijakan publik. Lebih khusus, fungsi distribusi memainkan peranan penting dalam kebijakan pajak dan transfer. Tanpa adanya intervensi kebijakan, distribusi pendapatan dan kekayaan akan tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan

kepemilikan kekayaan; dan 3) Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran. Suatu kebijakan publik, misalnya pengenaan pajak dan pengeluaran publik, dapat secara simultan diarahkan kepada tiga tujuan tadi. Permasalahan utama adalah bagaimana merancang kebijakan anggaran sehingga tujuan yang berbeda-beda tersebut dapat dicapai secara lebih terpadu.

Kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut akan tercermin dalam kebijakan anggaran, sehingga kebijakan anggaran secara simultan mempunyai beberapa tujuan, yaitu peningkatan layanan pemerintah perlu diikuti dengan kenaikan pajak (tujuan alokasi), distribusi pendapatan ke kelompok rendah/tinggi perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya (tujuan distribusi), dan kebijakan yang lebih ekspansif diperlukan dengan menaikkan pengeluaran publik atau dengan menurunkan pajak (tujuan stabilisasi) (Suparmoko, 2002:16). Suatu kebijakan publik tertentu mungkin tidak dapat memenuhi tiga tujuan sekaligus, sehingga dimungkinkan akan ada banyak pengecualian. Namun demikian, suatu kebijakan selalu berupaya meminimumkan konflik antar masing-masing tujuan.

Dalam situasi tertentu, mekanisme pasar mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien yang timbul pada saat tidak seorang pun dapat dipuaskan lebih baik tanpa menyebabkan orang lain menderita kerugian. Namun demikian, suatu masyarakat dapat saja memilih alokasi yang tidak efisien atas dasar kesetaraan atau kriteria lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya suatu intervensi pemerintah dalam operasi pasar bebas. Ada dua argumen perlunya intervensi pemerintah yaitu kegagalan pasar dan aspek keadilan.

Menurut Soepangat (1991: 9) dan Reksohadiprodjo (2001: 33), kegagalan pasar berkaitan dengan 1) Adanya beberapa barang publik yang bersifat *non-rival* dan *non-excludable*, seperti pertahanan nasional dan penerangan jalan, yang membuat tidak mungkin membebaskan biaya penyediannya kepada para pengguna. Hal ini menyebabkan kegagalan pasar dimana negara dapat saja mencoba turut campur mengatasi permasalahan

ini; 2) Konsumsi atau produksi barang/jasa publik mungkin menghasilkan suatu akibat eksternalitas positif atau negatif kepada masyarakat yang tidak tercermin dalam harga barang. Tanpa intervensi pemerintah, pasar akan memproduksi barang publik tersebut melebihi atau kekurangan, tergantung pada apakah eksternalitas ini baik atau buruk; 3) Tidak dapat Bergeraknya sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja, dapat membantu mencegah pencapaian alokasi sumber daya yang efisien; 4) Informasi yang tidak simetris dan tidak sempurna mungkin mengarah pada penilaian yang salah atas barang dan jasa publik, dan dengan demikian menyebabkan penawaran dan permintaan yang tidak tepat; dan 5) Kegagalan pasar juga berhubungan dengan permasalahan dari seleksi yang tidak menguntungkan dan bahaya moral ketika pembeli atau penjual bertindak secara eksklusif atas dasar mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

Aspek keadilan berkaitan dengan 1) Kepedulian secara luas atas kebutuhan mengatasi kemiskinan secara lebih serius harus menjadi perhatian oleh pemerintah; 2) Data empiris di seluruh dunia secara umum menyarankan bahwa peningkatan keadilan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan lebih cepat, dan kurangnya kemiskinan; 3) Ketidakadilan sering menghasilkan ketidakamanan dan kejahatan, eksternalitas negatif yang mempengaruhi pertumbuhan dan keadilan sosial, secara nasional dan global; 4) Peranan sektor swasta dan kebutuhan kemitraan dalam kesempatan, pemberdayaan dan proteksi perlu difasilitasi oleh pemerintah; 5) Penekanan pada aspek keadilan bukan berarti bahwa hanya negara yang harus atau dapat memberikan kontribusi menekan kemiskinan. Tugas ini berhubungan dengan penyediaan kesempatan, pemberdayaan dan proteksi. Tiga dimensi pokok dari kemiskinan yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh sektor publik; dan 6) Sektor swasta dapat berperan aktif dalam menciptakan kesempatan ekonomi (penciptaan lapangan kerja dan kredit), mempromosikan tambahan kepada anggota masyarakat (erat hubungannya kepada produsen dan pekerja swasta), dan memberikan kontribusi untuk mengurangi ketidakadilan melalui aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah dan partisipasinya dalam sektor swasta (rumah sakit umum dan sekolah yang dananya dari swasta)

Petty dalam Pressman (2000:8) mengatakan

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris bukan melalui perdagangan internasional (seperti pendapat Merkantilisme) tetapi melalui keuangan publik atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Disebutkan oleh Petty bahwa keuangan publik atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak merupakan determinan yang lebih penting untuk kemakmuran ekonomi daripada kebijakan perdagangan atau akumulasi surplus perdagangan yang besar. Smith dalam Pressman (2000:34) mengatakan bahwa perlunya menyetujui ketentuan pemerintah terhadap barang publik yang berhubungan dengan eksternalitas dalam jumlah besar. Dalam situasi normal sebagian besar transaksi dibayar oleh orang yang membeli dan mengkonsumsi produk, demikian juga semua manfaat produksi akan diperoleh oleh konsumen produk. Dalam situasi yang tidak normal terjadi kondisi ada pihak luar yang memperoleh keuntungan dan kerugian yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam kaitannya dengan eksternalitas dengan memberikan perlindungan (proteksi) terhadap kelompok tertentu yang dirugikan karena eksternalitas tersebut. Perlindungan disini dapat berupa pengenaan pajak terhadap pihak yang merugikan pihak lain atau pemberian subsidi kepada pihak yang dirugikan. Berkaitan dengan pajak dan retribusi berarti berhubungan dengan masalah desentralisasi fiskal.

Menurut Fuad (2005:1), keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, meliputi seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu.

Keuangan publik sebagai bagian dari ilmu ekonomi mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta. Sehingga, penting untuk mengembangkan model-model ekonomi yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti

keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi terhadap suatu keputusan publik. Dengan demikian, fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

Keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusinya terhadap pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik. Peranan sektor publik dalam perhitungan *Gross National Product* (GNP) atau pendapatan nasional adalah bahwa pemerintah memberi kontribusi terhadap GNP melalui pembelian barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan pemerintah yang dalam faktanya selalu meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan peningkatan pula dalam GNP. Dengan demikian, semakin meningkatnya perkembangan kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah dalam persentasenya terhadap pendapatan nasional (GNP). Hal ini sejalan dengan pendapat Adolf Wagner yang mengemukakan *Law of Ever Increasing State Activity* dan sudah diuji pula oleh Peacock dan Wiseman (Soepangat, 1991:41).

Menurut (Arsyad, 2004:45), untuk mengelompokkan teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara tepat dan sederhana bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan misalnya periode waktu lahirnya teori tersebut atau ide dari teori tersebut. Namun demikian, setelah memperhatikan beberapa kepustakaan yang membahas tentang teori pembangunan, akhirnya muncul klasifikasi teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mashab historis meliputi teori Friedrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher, dan Walt Witman Rostow. Teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mashab analitis mencakup teori Klasik, Neo-Klasik, dan Keynesian seperti teori Adam Smith, David Ricardo, Harrod-Domar, dan Solow-Swan. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Joseph

Schumpeter dan Teori Ketergantungan merupakan teori terpisah dari teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mashab historis dan analitis. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Adam Smith (1776) dan Harrod-Domar (1954).

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan output total adalah sumberdaya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumberdaya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada.

Menurut Adam Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Artinya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara

kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja. Sementara permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai “batas maksimum” dari sumber alam. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total dapat secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output, sedang pengaruh tak langsung adalah meningkatkan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

Spesialisasi dan pembagian kerja ini dapat menghasilkan pertumbuhan output, karena spesialisasi tersebut dapat meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja dapat mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan pekerjaan. Namun demikian, ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu makin meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Menurut Adam Smith, potensi pasar dapat dicapai secara maksimal, jika dan hanya jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan perundangan yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga masyarakat antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*. Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat

keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut. Menurut Arsyad (2004: 64), teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh dua ekonom sesudah John Maynard Keynes yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Harrod telah mengemukakan teorinya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal* sedang Domar mengemukakan teorinya pada tahun 1947 dalam jurnal *American Economic Review*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis John Maynard Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis John Maynard Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori Harrod-Domar berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*).

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh, terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol, serta kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap demikian juga rasio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari

pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, dan material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika modal sebanyak Rp3.000.000,- diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar Rp1.000.000,-, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Hubungan tersebut, yang dikenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding 1. Persamaan Harrod-Domar berikut ini, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal-output (COR = k).

$$= \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

$\Delta Y/Y$ pada persamaan tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output).

Secara lebih spesifik, persamaan itu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Semakin tinggi tabungan dan diinvestasikan, semakin tinggi pula output, sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (semakin besar COR, semakin rendah tingkat pertumbuhan output). Logika ekonomi dari persamaan tersebut sangat sederhana. Jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas dari investasi.

Pada tahun 1970an, para pakar ekonomi makro mendapat kritikan karena mendasarkan pada pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* per kapita (GDP per kapita) yang mencerminkan kemampuan penduduk dalam wilayah/negara tertentu dalam menghasilkan pendapatan. Di Indonesia, GDP

dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin kecil GDP per kapita yang dihasilkan, maka semakin miskin masyarakat wilayah/negara itu. Para ahli di bidang sosial kemasyarakatan memandang bahwa indikator kesejahteraan masyarakat yang hanya didasarkan pada PDB merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dalam memahami kesejahteraan masyarakat. Kemudian dikembangkan model dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam GDP sehingga menjadi *purchasing power adjusted real GDP*. Formulasi GDP per kapita dengan memperhitungkan daya beli ini akan membuat GDP suatu wilayah menjadi lebih obyektif jika dibandingkan dengan GDP wilayah/negara lain. Namun para ahli non-ekonomi tetaplah memandang bahwa transformasi indikator GDP per kapita berdasarkan daya beli ini tetaplah dianggap subyektif karena sangat ekonomi dan kuantitatif dalam berbicara tentang kesejahteraan masyarakat.

Muncul gagasan dengan indikator alternatif untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yaitu menggunakan *Physical Quality of Life Index (PQLI)* atau lebih dikenal sebagai *Basic Need Approach*. PQLI merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang mempertimbangkan kecukupan sandang, pangan, dan perumahan. Dalam perkembangannya indikator kesejahteraan masyarakat PQLI belumlah memuaskan, karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur berdasarkan perhitungan fisik, namun juga faktor-faktor non-fisik seperti kesehatan dan pendidikan.

United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990, memperkenalkan formula *human development index (HDI)* atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas dengan dan rata-rata lamanya sekolah), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (*purchasing power parity*). Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dengan memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan telah memadukan antara pendekatan

kuantitas dan kualitas hidup.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai *Millenium Development Goals (MDGs)*, yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi utama. Menurut *World Bank*, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in poverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*) dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan secara prinsipil harus berfokus pada seluruh aset bangsa, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata, dan pelaksanaannya harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan.

Menurut *Todaro* dalam *Badrudin (2010)* pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Karena itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti; pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan; kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian terhadap nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan; ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Dalam kajian empiris ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini tentang pengaruh belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oates meneliti tentang "*Fiscal Decentralization and Economic Development*" di 58 negara dengan hasil bahwa sentralisasi fiskal berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat pendapatan per kapita. Oates meneliti berikutnya hal yang sama dengan penelitian sebelumnya pada tahun 1985 di 43 negara. Berdasarkan sampel 18 negara industri sebagai obyek penelitian diperoleh hasil bahwa kontribusi pemerintah pusat dalam anggaran pengeluaran publik sebesar 65% sedang sampel di 25 negara industri sebagai obyek penelitian diperoleh hasil bahwa kontribusi pemerintah pusat dalam anggaran pengeluaran publik rata-rata lebih daripada 90% (Oates, 1993:236-243).

Prud'Homme Remy (1994) meneliti tentang *On Dangers of Decentralization*. Simpulan penelitiannya adalah 1) manfaat implementasi desentralisasi fiskal dalam hal efisiensi tidak jelas nyata seperti yang disarankan dalam teori desentralisasi fiskal karena adanya asumsi yang rapuh dalam teori desentralisasi fiskal; 2) efisiensi produksi dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah manfaat yang meragukan karena adanya *carry cost*; 3) implementasi desentralisasi fiskal dalam kebijakan redistribusi apakah *interpersonal* atau *interjurisdictional* adalah sesuatu yang lebih sulit; dan 4) implementasi desentralisasi fiskal membuat kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat). Hal ini dalam faktanya sering terjadi ketika situasi ekonomi makro pusat dan daerah tidak sama dan ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang sama dengan Partai Politik yang mendukung Presiden terpilih. Hal ini nampak sekali di Indonesia.

Bhal (1999) meneliti tentang *Implementation Rules for Fiscal Decentralization* yang dipresentasikan di *International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute*, Taiwan. Dalam penelitiannya, Bhal menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal di suatu wilayah ditentukan oleh 12 ketentuan peraturan, yaitu 1) desentralisasi fiskal harus dipandang sebagai sebuah sistem yang komprehensif; 2) desentralisasi fiskal harus diikuti dengan desentralisasi keuangan; 3) pemerintah pusat harus mempunyai kekuatan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi desentralisasi fiskal; 4) satu sistem dalam *intergovernmental* tidak *fit* untuk sektor perkotaan dan perdesaan; 5) implementasi desentralisasi fiskal menuntut pemerintahan lokal yang kuat dalam hal perpajakan daerah; 6) pemerintah pusat harus mampu menjadi kendali dari desentralisasi fiskal yang disusunnya; 7) adanya ketentuan dalam desentralisasi fiskal yang sederhana yang *simple*; 8) desain dari sistem transfer dalam *intergovernmental* seharusnya sejalan dengan bentuk desentralisasi fiskal; 9) desentralisasi fiskal seharusnya mempertimbangkan tiga tingkatan dalam pemerintahan; 10) paksaan yang ekstra keras dalam memperhatikan kendala anggaran; 11) tuntutan sistem dalam *intergovernmental* yang terencana dan transisional; dan 12) harus ada pemenang (keberhasilan) dalam implementasi desentralisasi fiskal.

Jin dan Heng-Fu Zou (2000) meneliti tentang *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walau secara teori disebutkan harus ada kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam pemerintahan anggaran provinsi agar efisien dan bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi namun dalam fakta empiris di China terjadi penyimpangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran anggaran provinsi meningkat tetapi pertumbuhan ekonomi menurun. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan data panel (*pooled data*) di 30 provinsi selama 2 tahap penelitian, yaitu 1979-1993 (sistem kontrak fiskal) dan 1993-1999 (sistem perpajakan). Menurut Lin dan Zhiqiang Liu, keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal tergantung dari kelembagaan fiskal dan sistem politik yang digunakan.

Adi (2005) melakukan penelitian tentang

Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan studi kasus di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua daerah benar-benar siap memasuki desentralisasi fiskal. Data awal dari temuan Adi menunjukkan ada 46% daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata. Faktor inilah yang diindikasikan sebagai alasan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang positif antardaerah setelah memasuki era desentralisasi fiskal. Namun demikian, apabila dilakukan analisis secara parsial, perbedaan yang terjadi hanya beberapa daerah saja. Bukti empiris menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang diindikasikan kurang siap menghadapi desentralisasi fiskal. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, alokasi belanja pembangunan harus dilakukan secara cermat. Belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan PAD relatif terjamin, namun demikian yang paling diuntungkan justru pihak swasta, dalam hal ini investor (para pemilik modal). Belanja ini hendaknya juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata (mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi).

Suryanto meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kajian Teoritis dan Aplikasi Anggaran (2005). Menurut Suryanto (2005:13), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan yang didasarkan temuan terdahulu maupun gambaran umum yang dialami di wilayah penelitian. Gambaran terhadap kondisi desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian Suryanto menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya kesenjangan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Suryanto dkk., 2005:67).

Suhendra dan Hidayat Amir (2006:1-16) menjelaskan bahwa implementasi desentralisasi fiskal selama 5 tahun pertama sejak 1 Januari 2001 masih lemah tetapi dalam kondisi menuju yang ideal. Beberapa hal yang menjadi isu temuan Suhendra dan Hidayat Amir adalah 1) kekuatan dan peranan perpajakan di tingkat lokal kabupaten/kota masih rendah karena pemerintah kabupaten/kota masih bergantung dari pemerintah pusat; 2) penentuan formula dalam Dana Alokasi Umum (DAU) berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, peran DAU menjadi kurang signifikan karena kepentingan politik lebih berperan; 3) tekanan transfer lokal membutuhkan pendekatan keseimbangan agar otonomi daerah menjadi lebih kuat dan menjadi insentif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang akuntabel; dan 4) lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, antarpemerintah provinsi, antara pemerintah kabupaten dan kota, antarpemerintah kabupaten, dan antarpemerintah kota.

Sasana (2009) meneliti tentang Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan populasi semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 dengan analisis jalur. Simpulan hasil penelitian Sasana adalah 1) Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah; 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 4) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 5) Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah; dan 6) Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1:** Belanja modal pada APBD berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- H2:** Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- H3:** Belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai rencana tentang bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberi arti terhadap data tersebut secara efisien dan efektif. Rancangan penelitian meliputi tahapan penentuan alat (instrumen), pengambilan data yang digunakan, cara pengumpulan, analisis data yang akan digunakan, serta pemberian kesempatan atas hasil analisis yang dilakukan. Tipe penelitian studi sosial menurut Singarimbun dan Effendi ada tiga macam (1992: 51), yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori (penjelasan). Berdasarkan hal tersebut, maka tipologi penelitian ini adalah eksplanatori (penjelasan), yaitu studi yang dilakukan untuk menguji dan menjelaskan variabel yang diteliti dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Menurut Cooper dan Emory (1996: 214), ide dasar pengambilan sampel adalah dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, simpulan tentang karakteristik populasi yang dapat diperoleh. Kemudian dijelaskan bahwa sebuah elemen adalah subyek di mana pengukuran tersebut dilakukan yang disebut dengan unit penelitian (*the unit of study*). Keunggulan ekonomis pengambilan sampel dibandingkan dengan sensus sangat besar, terutama pertimbangan biaya dan waktu. Sekalipun demikian, karena pertimbangan biaya dan waktu dapat diabaikan, maka penelitian ini menggunakan sensus. Sensus dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota, yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.

Berdasarkan pengambilan data yang runtut dari tahun 2001 sampai dengan 2005, maka data berbentuk

time series. Berdasarkan jumlah sampel kabupaten/kota sebanyak 35 kabupaten/kota maka data berbentuk *cross section*. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section* (*pooled the data*). Pemenuhan kondisi data ini agar dalam menggunakan model analisis regresi memenuhi persyaratan untuk dioperasionalkan. Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mengingat seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku/*compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Artikel pendukung studi dikumpulkan melalui *website* yang berupa referensi dari terbitan berkala, buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Data sekunder yang tersedia dikumpulkan, diteliti, didiskusikan, dan diolah dengan berbagai pihak yang berkompeten agar data tersebut valid.

Identifikasi variabel didasarkan atas kajian empiris dan teoritis sebagai acuan kerangka berpikir yang terdiri dua variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel penyebab pemula yang mempengaruhi variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah belanja modal pada APBD (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2). Variabel belanja modal pada APBD (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) disebut sebagai variabel eksogen karena variabel belanja modal pada APBD (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) keberagamannya tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab di dalam sistem dan tidak dapat ditetapkan hubungan kausalnya. Dalam penelitian ini, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan desimal. Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Penggunaan variabel belanja modal dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1) dan (2). Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam satuan persen. Penggunaan data pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam Belanja Modal dan Pengeluaran Total pemerintah kabupaten/kota dalam harga berlaku (Sasana, 2009). Rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi per tahun} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: PDRB_t adalah PDRB tahun ke t
 PDRB_{t-1} adalah PDRB tahun ke $t-1$

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen dalam suatu model. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y). Variabel kesejahteraan masyarakat (Y) disebut sebagai endogen tergantung karena keberagamannya dijelaskan oleh variabel eksogen. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dinyatakan dalam satuan desimal. Variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diproksi dengan tingkat komposisi *Human Development Index*/Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup. Dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dengan usia harapan hidup, dimensi manusia terdidik diukur dengan tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat

pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi, dan dimensi standar hidup yang layak yang diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1 BM + \beta_2 REK + e$$

keterangan:

α : konstanta

β_1 : koefisien parameter untuk variabel Belanja Modal

β_2 : koefisien parameter untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi

e : variabel pengganggu

KM = Kesejahteraan Masyarakat

BM = Belanja Modal pada APBD

REK = Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program Excel dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis untuk membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan. Pembuktian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistika yang meliputi uji t tes dan uji F tes dengan cara sebagai berikut (Subiyakto, 2004): Pengujian hipotesis dilakukan untuk mencari nilai t -test untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi masing-masing terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini a ditetapkan sebesar 5%.

HASIL PENELITIAN

Data Total Pengeluaran dan Belanja Modal pada APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini:

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dihitung nilai kontribusi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran pada APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 3. Secara umum, kontribusi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 cenderung berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi proporsi biaya modal terhadap total

Tabel 1
Total Pengeluaran pada APBD Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005 (jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	198,874.72	253,205.38	331,694.77	344,791.09	379,515.63
Kabupaten Banyumas	341,320.79	374,393.38	471,777.49	488,534.62	532,868.53
Kabupaten Batang	186,301.94	215,516.01	296,802.73	325,408.82	309,373.48
Kabupaten Blora	258,148.04	327,882.53	398,203.76	377,671.51	370,991.82
Kabupaten Boyolali	242,887.42	287,112.59	390,543.66	395,622.55	427,428.74
Kabupaten Brebes	325,035.16	354,580.30	470,672.93	475,275.80	466,160.78
Kabupaten Cilacap	352,554.41	389,405.48	545,722.03	507,788.66	552,924.74
Kabupaten Demak	176,225.74	230,461.86	327,643.10	335,464.95	360,640.55
Kabupaten Grobogan	285,594.56	320,855.97	424,580.83	473,481.02	452,077.24
Kabupaten Jepara	257,532.59	290,306.77	370,344.03	385,527.38	401,140.56
Kabupaten Karanganyar	238,717.25	266,567.40	348,659.94	351,188.88	388,737.61
Kabupaten Kebumen	264,447.18	352,473.70	431,376.49	427,806.04	414,256.93
Kabupaten Kendal	265,534.77	358,644.11	407,490.04	396,809.05	367,294.15
Kabupaten Klaten	320,287.04	364,272.11	483,962.19	494,976.20	521,073.68
Kabupaten Kudus	211,903.52	147,980.91	329,560.87	335,573.02	427,004.40
Kabupaten Magelang	266,170.33	327,994.15	390,323.61	417,632.23	440,995.77
Kabupaten Pati	286,850.55	217,459.95	419,773.70	437,343.08	453,304.27
Kabupaten Pekalongan	191,825.09	256,791.68	304,568.12	311,462.41	337,490.91
Kabupaten Pemasang	241,889.35	281,545.50	408,865.10	417,909.67	390,986.70
Kabupaten Purbalingga	235,681.40	280,918.93	350,141.65	346,236.14	354,338.89
Kabupaten Purworejo	260,667.77	278,232.23	374,020.35	353,881.41	354,170.86
Kabupaten Rembang	180,771.13	202,741.51	265,460.00	286,605.17	278,421.58
Kabupaten Semarang	230,342.78	285,329.67	357,769.62	363,569.88	373,669.30
Kabupaten Sragen	250,634.84	276,284.95	390,467.39	380,335.92	403,874.76
Kabupaten Sukoharjo	205,601.79	239,662.08	336,907.12	328,493.08	329,236.58
Kabupaten Tegal	274,392.31	310,179.62	445,003.51	439,398.56	436,224.11
Kabupaten Temanggung	216,189.01	254,228.53	321,522.39	307,170.94	256,108.69
Kabupaten Wonogiri	257,368.55	300,401.01	403,593.89	421,874.65	441,082.71
Kabupaten Wonosobo	177,333.92	235,247.00	335,183.94	351,619.87	334,134.88
Kota Magelang	105,759.82	141,675.82	178,912.85	175,413.69	172,104.24
Kota Pekalongan	96,798.86	133,676.21	168,958.37	180,287.99	179,445.70
Kota Salatiga	74,547.31	110,040.02	161,956.86	168,950.59	172,229.94
Kota Semarang	419,529.05	308,716.50	663,887.75	661,416.26	712,545.91
Kota Surakarta	209,337.38	262,624.68	351,968.34	328,310.68	340,095.17
Kota Tegal	122,265.28	158,163.67	218,966.95	252,064.89	247,588.42

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>.

Tabel 2
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
Tahun 2001-2005 (jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	10,035.85	13,427.61	69,535.20	37,516.10	59,073.41
Kabupaten Banyumas	29,013.29	32,763.05	51,479.50	35,169.22	59,630.66
Kabupaten Batang	9,445.67	18,367.61	61,795.07	46,311.29	42,057.44
Kabupaten Blora	17,343.74	20,804.81	71,815.79	45,782.48	31,474.17
Kabupaten Boyolali	15,352.71	20,452.54	77,012.21	49,428.77	57,414.55
Kabupaten Brebes	15,232.51	21,911.23	127,001.76	84,037.70	63,104.98
Kabupaten Cilacap	19,144.04	27,633.00	36,176.58	66,943.06	72,907.38
Kabupaten Demak	13,396.11	19,258.00	20,891.44	22,524.87	22,725.65
Kabupaten Grobogan	25,979.01	25,674.29	29,507.77	89,614.01	70,325.98
Kabupaten Jepara	16,447.28	24,808.05	76,681.60	54,454.78	56,650.37
Kabupaten Karanganyar	18,437.04	23,400.49	71,101.59	42,525.06	63,466.26
Kabupaten Kebumen	14,994.24	17,741.30	96,674.03	56,618.26	41,117.01
Kabupaten Kendal	15,683.52	21,375.67	114,730.52	93,194.41	70,714.54
Kabupaten Klaten	15,605.97	23,462.88	30,404.04	29,841.86	31,048.53
Kabupaten Kudus	18,924.62	4,694.58	27,512.04	47,786.47	104,825.90
Kabupaten Magelang	25,203.59	35,199.31	45,195.02	46,276.78	48,151.04
Kabupaten Pati	24,302.11	36,212.46	46,286.37	46,762.80	51,851.41
Kabupaten Pekalongan	15,898.45	24,491.31	42,315.81	38,485.29	37,682.48
Kabupaten Pemasang	14,949.52	21,987.66	34,550.35	78,771.95	31,937.84
Kabupaten Purbalingga	16,782.53	30,891.16	40,514.80	41,652.90	38,162.56
Kabupaten Purworejo	16,531.93	19,087.02	62,308.88	38,944.82	32,664.49
Kabupaten Rembang	11,485.20	11,664.70	37,619.47	22,130.72	15,857.61
Kabupaten Semarang	15,335.79	27,099.47	61,019.54	37,747.59	32,435.79
Kabupaten Sragen	13,218.86	18,391.66	23,664.19	43,164.37	57,196.31
Kabupaten Sukoharjo	13,055.96	15,706.44	64,889.60	29,516.31	31,152.65
Kabupaten Tegal	16,132.98	22,676.11	138,398.88	76,669.72	72,208.00
Kabupaten Temanggung	10,052.17	12,394.53	77,384.86	36,267.08	21,025.35
Kabupaten Wonogiri	14,014.44	17,750.16	88,785.08	70,184.96	112,348.58
Kabupaten Wonosobo	10,442.61	14,941.11	19,431.71	82,295.40	72,702.21
Kota Magelang	9,676.94	13,904.29	41,451.05	32,335.73	22,200.07
Kota Pekalongan	7,708.65	9,875.78	53,299.76	42,961.88	29,859.78
Kota Salatiga	5,867.39	10,441.42	56,595.56	43,174.17	35,315.94
Kota Semarang	51,166.25	66,141.45	81,116.64	35,459.18	32,978.04
Kota Surakarta	20,820.64	22,866.42	25,720.85	13,492.01	10,175.44
Kota Tegal	13,105.88	14,988.38	61,241.28	73,630.66	50,129.09

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>.

Tabel 3
Kontribusi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	5.05	5.30	20.96	10.88	15.57
Kabupaten Banyumas	8.50	8.75	10.91	7.20	11.19
Kabupaten Batang	5.07	8.52	20.82	14.23	13.59
Kabupaten Blora	6.72	6.35	18.03	12.12	8.48
Kabupaten Boyolali	6.32	7.12	19.72	12.49	13.43
Kabupaten Brebes	4.69	6.18	26.98	17.68	13.54
Kabupaten Cilacap	5.43	7.10	6.63	13.18	13.19
Kabupaten Demak	7.60	8.36	6.38	6.71	6.30
Kabupaten Grobogan	9.10	8.00	6.95	18.93	15.56
Kabupaten Jepara	6.39	8.55	20.71	14.12	14.12
Kabupaten Karanganyar	7.72	8.78	20.39	12.11	16.33
Kabupaten Kebumen	5.67	5.03	22.41	13.23	9.93
Kabupaten Kendal	5.91	5.96	28.16	23.49	19.25
Kabupaten Klaten	4.87	6.44	6.28	6.03	5.96
Kabupaten Kudus	8.93	3.17	8.35	14.24	24.55
Kabupaten Magelang	9.47	10.73	11.58	11.08	10.92
Kabupaten Pati	8.47	16.65	11.03	10.69	11.44
Kabupaten Pekalongan	8.29	9.54	13.89	12.36	11.17
Kabupaten Pemalang	6.18	7.81	8.45	18.85	8.17
Kabupaten Purbalingga	7.12	11.00	11.57	12.03	10.77
Kabupaten Purworejo	6.34	6.86	16.66	11.01	9.22
Kabupaten Rembang	6.35	5.75	14.17	7.72	5.70
Kabupaten Semarang	6.66	9.50	17.06	10.38	8.68
Kabupaten Sragen	5.27	6.66	6.06	11.35	14.16
Kabupaten Sukoharjo	6.35	6.55	19.26	8.99	9.46
Kabupaten Tegal	5.88	7.31	31.10	17.45	16.55
Kabupaten Temanggung	4.65	4.88	24.07	11.81	8.21
Kabupaten Wonogiri	5.45	5.91	22.00	16.64	25.47
Kabupaten Wonosobo	5.89	6.35	5.80	23.40	21.76
Kota Magelang	9.15	9.81	23.17	18.43	12.90
Kota Pekalongan	7.96	7.39	31.55	23.83	16.64
Kota Salatiga	7.87	9.49	34.94	25.55	20.51
Kota Semarang	12.20	21.42	12.22	5.36	4.63
Kota Surakarta	9.95	8.71	7.31	4.11	2.99
Kota Tegal	10.72	9.48	27.97	29.21	20.25

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah dari Tabel 1 dan Tabel 2.

pengeluaran karena kebutuhan dana pembangunan untuk investasi pemerintah kabupaten/kota yang mengalami dinamisasi pada tahun 2001-2005. Fluktuasi

proporsi tersebut dijelaskan juga dengan data pada Tabel 4 tentang pertumbuhan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005.

Tabel 4
Pertumbuhan Belanja Modal pada APBD
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
Tahun 2001-2005 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	33.80	417.85	-46.05	57.46	85.27
Kabupaten Banyumas	12.92	57.13	-31.68	69.55	106.13
Kabupaten Batang	94.46	236.44	-25.06	-9.19	51.82
Kabupaten Blora	19.96	245.19	-36.25	-31.25	85.50
Kabupaten Boyolali	33.22	276.54	-35.82	16.16	28.91
Kabupaten Brebes	43.85	479.62	-33.83	-24.91	87.44
Kabupaten Cilacap	44.34	30.92	85.05	8.91	210.13
Kabupaten Demak	43.76	8.48	7.82	0.89	60.33
Kabupaten Grobogan	-1.17	14.93	203.70	-21.52	14.75
Kabupaten Jepara	50.83	209.10	-28.99	4.03	113.74
Kabupaten Karanganyar	26.92	203.85	-40.19	49.24	24.87
Kabupaten Kebumen	18.32	444.91	-41.43	-27.38	144.30
Kabupaten Kendal	36.29	436.73	-18.77	-24.12	148.20
Kabupaten Klaten	50.35	29.58	-1.85	4.04	169.40
Kabupaten Kudus	-75.19	486.04	73.69	119.36	-36.76
Kabupaten Magelang	39.66	28.40	2.39	4.05	226.95
Kabupaten Pati	49.01	27.82	1.03	10.88	50.56
Kabupaten Pekalongan	54.05	72.78	-9.05	-2.09	34.94
Kabupaten Pemalang	47.08	57.14	127.99	-59.46	262.88
Kabupaten Purbalingga	84.07	31.15	2.81	-8.38	135.25
Kabupaten Purworejo	15.46	226.45	-37.50	-16.13	61.02
Kabupaten Rembang	1.56	222.51	-41.17	-28.35	258.67
Kabupaten Semarang	76.71	125.17	-38.14	-14.07	41.55
Kabupaten Sragen	39.13	28.67	82.40	32.51	98.65
Kabupaten Sukoharjo	20.30	313.14	-54.51	5.54	142.84
Kabupaten Tegal	40.56	510.33	-44.60	-5.82	107.07
Kabupaten Temanggung	23.30	524.35	-53.13	-42.03	267.14
Kabupaten Wonogiri	26.66	400.19	-20.95	60.08	37.53
Kabupaten Wonosobo	43.08	30.06	323.51	-11.66	55.04

Kabupaten Wonosobo	43.08	30.06	323.51	-11.66	55.04
Kota Magelang	43.68	198.12	-21.99	-31.35	125.02
Kota Pekalongan	28.11	439.70	-19.40	-30.50	91.64
Kota Salatiga	77.96	442.03	-23.71	-18.20	54.14
Kota Semarang	29.27	22.64	-56.29	-7.00	174.23
Kota Surakarta	9.83	12.48	-47.54	-24.58	527.82
Kota Tegal	14.36	308.59	20.23	-31.92	77.82

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah dari Tabel 2.

Untuk mengukur nilai produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku karena data dalam Belanja Modal dan Pengeluaran Total pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam harga berlaku (Sasana, 2009). Berikut disajikan data pada Tabel 5 tentang PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menurut harga berlaku tahun 2001-2005.

Berdasarkan Tabel 5 maka dapat dihitung kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 seperti yang hasilnya tampak pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 5 maka dapat dihitung pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 seperti yang hasilnya tampak pada Tabel 7 berikut ini:

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diukur dengan pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan secara prinsipil harus berfokus pada seluruh aset bangsa, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata, dan pelaksanaannya harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan. Indikator yang digunakan dalam pencapaian pembangunan

manusia tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut ini disajikan IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005 pada Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8 tampak angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2001-2005 mengalami kenaikan. Apabila dikaitkan dengan awal pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah 1 Januari 2001 sebagai awal desentralisasi fiskal maka ada kaitan antara desentralisasi fiskal dengan indikator kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM (Soesilowati, 2005:112-115). Hal lain yang dapat dilihat dari Tabel 8 adalah IPM untuk kota cenderung lebih tinggi daripada IPM untuk kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan karena faktor belanja modal dari pemerintah kota yang lebih banyak daripada belanja modal pemerintah kabupaten.

Berdasarkan data pada Tabel 2 (Belanja Modal pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005), Tabel 7 (Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005), dan Tabel 8 (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005), dapat dilakukan pengujian statistik menggunakan uji regresi t tes dan F tes (Subiyakto, 2004) dengan nilai α ditetapkan sebesar 5%. Pengujian tersebut untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini. Hasil uji regresi ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 5
PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH,
MENURUT HARGA BERLAKU, TAHUN 2001-2005 (jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	204,183.23	253,205.38	316,761.18	344,791.09	379,631.26
Kabupaten Banyumas	229,177.34	374,584.45	471,802.99	488,851.69	499,934.87
Kabupaten Batang	231,156.00	227,830.92	296,802.73	325,180.84	262,310.10
Kabupaten Blora	308,234.17	327,882.53	403,970.98	378,582.86	370,596.27
Kabupaten Boyolali	218,653.21	287,112.03	430,749.86	395,692.55	382,077.39
Kabupaten Brebes	189,036.74	373,030.56	458,169.98	447,994.38	434,585.25
Kabupaten Cilacap	213,898.90	389,405.48	545,722.03	502,955.11	551,365.88
Kabupaten Demak	286,850.55	217,459.95	327,643.10	332,211.47	265,382.64
Kabupaten Grobogan	260,686.17	322,564.97	344,865.89	467,797.97	451,992.26
Kabupaten Jepara	254,776.00	290,306.77	370,344.03	385,401.28	401,140.56
Kabupaten Karanganyar	226,759.43	266,943.82	348,659.94	363,553.29	348,879.66
Kabupaten Kebumen	154,825.80	352,513.70	431,376.49	427,806.04	413,200.86
Kabupaten Kendal	311,623.51	358,644.11	407,490.04	396,744.55	334,613.77
Kabupaten Klaten	297,411.76	401,310.43	483,855.11	495,124.46	518,208.43
Kabupaten Kudus	182,701.69	239,398.31	330,808.67	347,334.97	317,650.82
Kabupaten Magelang	249,869.28	327,994.14	390,323.61	417,376.80	437,162.96
Kabupaten Pati	264,934.08	324,087.78	419,773.70	444,319.72	453,304.27
Kabupaten Pekalongan	224,698.09	256,791.67	304,168.86	311,462.41	297,233.83
Kabupaten Pemalang	228,810.68	282,586.87	408,865.01	405,560.10	388,688.85
Kabupaten Purbalingga	236,598.24	280,918.93	350,141.65	317,284.17	314,628.79
Kabupaten Purworejo	271,550.75	278,262.23	374,020.36	350,842.40	315,674.24
Kabupaten Rembang	171,657.50	202,741.51	265,400.00	286,605.17	243,010.13
Kabupaten Semarang	216,115.97	285,329.67	357,769.62	363,569.88	271,415.56
Kabupaten Sragen	225,226.41	276,284.95	390,467.39	380,335.92	766,104.06
Kabupaten Sukoharjo	165,932.34	205,601.52	336,907.17	347,962.30	307,736.90
Kabupaten Tegal	305,910.26	310,179.62	422,813.96	444,552.83	447,326.93
Kabupaten Temanggung	192,512.98	252,361.51	294,674.04	308,187.44	244,119.34
Kabupaten Wonogiri	248,294.86	300,401.01	403,593.37	444,084.46	441,082.71
Kabupaten Wonosobo	215,773.07	235,247.00	352,361.48	351,619.86	348,315.83
Kota Magelang	113,137.74	143,970.19	178,912.85	175,418.97	164,960.09
Kota Pekalongan	90,924.55	133,676.21	107,177.58	180,288.47	179,445.90
Kota Salatiga	89,074.03	110,040.07	110,040.02	168,950.59	172,292.84
Kota Semarang	584,512.40	585,763.46	621,669.89	661,416.25	647,569.06
Kota Surakarta	257,489.90	262,624.68	351,968.33	327,393.37	318,941.42
Kota Tegal	197,180.07	158,163.67	218,966.95	252,064.89	250,636.87
Provinsi Jawa Tengah	8,122,178.69	9,897,222.10	12,631,041.82	13,041,322.52	12,943,225.60

Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto per Kabupaten/Kota, Tahun 2001-2008.*
 BPS 2009.

Tabel 6
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap
PDRB Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	2.51	2.56	2.51	2.64	2.93
Kabupaten Banyumas	2.82	3.78	3.74	3.75	3.86
Kabupaten Batang	2.85	2.30	2.35	2.49	2.03
Kabupaten Blora	3.79	3.31	3.20	2.90	2.86
Kabupaten Boyolali	2.69	2.90	3.41	3.03	2.95
Kabupaten Brebes	2.33	3.77	3.63	3.44	3.36
Kabupaten Cilacap	2.63	3.93	4.32	3.86	4.26
Kabupaten Demak	3.53	2.20	2.59	2.55	2.05
Kabupaten Grobogan	3.21	3.26	2.73	3.59	3.49
Kabupaten Jepara	3.14	2.93	2.93	2.96	3.10
Kabupaten Karanganyar	2.79	2.70	2.76	2.79	2.70
Kabupaten Kebumen	1.91	3.56	3.42	3.28	3.19
Kabupaten Kendal	3.84	3.62	3.23	3.04	2.59
Kabupaten Klaten	3.66	4.05	3.83	3.80	4.00
Kabupaten Kudus	2.25	2.42	2.62	2.66	2.45
Kabupaten Magelang	3.08	3.31	3.09	3.20	3.38
Kabupaten Pati	3.26	3.27	3.32	3.41	3.50
Kabupaten Pekalongan	2.77	2.59	2.41	2.39	2.30
Kabupaten Pemalang	2.82	2.86	3.24	3.11	3.00
Kabupaten Purbalingga	2.91	2.84	2.77	2.43	2.43
Kabupaten Purworejo	3.34	2.81	2.96	2.69	2.44
Kabupaten Rembang	2.11	2.05	2.10	2.20	1.88
Kabupaten Semarang	2.66	2.88	2.83	2.79	2.10
Kabupaten Sragen	2.77	2.79	3.09	2.92	5.92
Kabupaten Sukoharjo	2.04	2.08	2.67	2.67	2.38
Kabupaten Tegal	3.77	3.13	3.35	3.41	3.46
Kabupaten Temanggung	2.37	2.55	2.33	2.36	1.89
Kabupaten Wonogiri	3.06	3.04	3.20	3.41	3.41
Kabupaten Wonosobo	2.66	2.38	2.79	2.70	2.69
Kota Magelang	1.39	1.45	1.42	1.35	1.27
Kota Pekalongan	1.12	1.35	0.85	1.38	1.39
Kota Salatiga	1.10	1.11	0.87	1.30	1.33
Kota Semarang	7.20	5.92	4.92	5.07	5.00
Kota Surakarta	3.17	2.65	2.79	2.51	2.46
Kota Tegal	2.43	1.60	1.73	1.93	1.94

Sumber: Tabel 5. Data diolah.

Tabel 7
Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	24.01	25.10	8.85	10.10	17.02
Kabupaten Banyumas	63.45	25.95	3.61	2.27	23.82
Kabupaten Batang	-1.44	30.27	9.56	-19.33	4.77
Kabupaten Blora	6.37	23.21	-6.28	-2.11	5.30
Kabupaten Boyolali	31.31	50.03	-8.14	-3.44	17.44
Kabupaten Brebes	97.33	22.82	-2.22	-2.99	28.74
Kabupaten Cilacap	82.05	40.14	-7.84	9.63	31.00
Kabupaten Demak	-24.19	50.67	1.39	-20.12	1.94
Kabupaten Grobogan	23.74	6.91	35.65	-3.38	15.73
Kabupaten Jepara	13.95	27.57	4.07	4.08	12.42
Kabupaten Karanganyar	17.72	30.61	4.27	-4.04	12.14
Kabupaten Kebumen	127.68	22.37	-0.83	-3.41	36.45
Kabupaten Kendal	15.09	13.62	-2.64	-15.66	2.60
Kabupaten Klaten	34.93	20.57	2.33	4.66	15.62
Kabupaten Kudus	31.03	38.18	5.00	-8.55	16.42
Kabupaten Magelang	31.27	19.00	6.93	4.74	15.49
Kabupaten Pati	22.33	29.52	5.85	2.02	14.93
Kabupaten Pekalongan	14.28	18.45	2.40	-4.57	7.64
Kabupaten Pemalang	23.50	44.69	-0.81	-4.16	15.81
Kabupaten Purbalingga	18.73	24.64	-9.38	-0.84	8.29
Kabupaten Purworejo	2.47	34.41	-6.20	-10.02	5.17
Kabupaten Rembang	18.11	30.91	7.99	-15.21	10.45
Kabupaten Semarang	32.03	25.39	1.62	-25.35	8.42
Kabupaten Sragen	22.67	41.33	-2.59	101.43	40.71
Kabupaten Sukoharjo	23.91	63.86	3.28	-11.56	19.87
Kabupaten Tegal	1.40	36.31	5.14	0.62	10.87
Kabupaten Temanggung	31.09	16.77	4.59	-20.79	7.91
Kabupaten Wonogiri	20.99	34.35	10.03	-0.68	16.17
Kabupaten Wonosobo	9.03	49.78	-0.21	-0.94	14.41
Kota Magelang	27.25	24.27	-1.95	-5.96	10.90
Kota Pekalongan	47.02	-19.82	68.21	-0.47	23.74
Kota Salatiga	23.54	0.00	53.54	1.98	19.76
Kota Semarang	0.21	6.13	6.39	-2.09	2.66
Kota Surakarta	1.99	34.02	-6.98	-2.58	6.61
Kota Tegal	-19.79	38.44	15.12	-0.57	8.30

Sumber: Tabel 5. Data diolah.

Tabel 8
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2005

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kabupaten Banjarnegara	63.6	63.7	65.2	66.9	67.3
Kabupaten Banyumas	66.0	66.7	68.2	70.3	70.7
Kabupaten Batang	63.6	65.5	65.4	67	67.6
Kabupaten Blora	61.6	64.7	64.4	66.5	67.9
Kabupaten Boyolali	64.4	65.7	65.9	68.5	69
Kabupaten Brebes	60.2	61.3	61.6	63.4	64.3
Kabupaten Cilacap	63.1	65.3	64.8	68.8	69.5
Kabupaten Demak	65.9	66.4	66	69	69.4
Kabupaten Grobogan	64.2	65.5	65.4	67.3	68.2
Kabupaten Jepara	65.3	66.9	67.7	69.1	69.6
Kabupaten Karanganyar	64.5	68.5	68.9	70.5	70.7
Kabupaten Kebumen	64.9	65.6	65.7	68	68.9
Kabupaten Kendal	62.1	65.5	63.3	67.3	67.5
Kabupaten Klaten	65.1	67.8	67.9	71	71.4
Kabupaten Kudus	66.0	66.9	67.4	69.4	70
Kabupaten Magelang	65.1	67.2	66.7	69.1	69.9
Kabupaten Pati	65.2	68.6	68.4	70.6	70.9
Kabupaten Pekalongan	61.8	63.9	64.5	67.6	68.2
Kabupaten Pemalang	60.7	62.2	63.4	65.6	66.3
Kabupaten Purbalingga	63.0	65.0	65.9	68.7	69.3
Kabupaten Purworejo	65.3	68.4	65.9	68.7	69.1
Kabupaten Rembang	64.7	65.5	64.6	67.5	69
Kabupaten Semarang	67.9	69.5	68.8	71.4	71.9
Kabupaten Sragen	62.3	64.9	64.6	66.1	66.6
Kabupaten Sukoharjo	66.5	67.7	66.1	70.7	71.2
Kabupaten Tegal	62.2	63.3	63.5	66.8	67.5
Kabupaten Temanggung	67.1	69.6	68.8	71.4	71.8
Kabupaten Wonogiri	64.0	66.5	65.5	68.4	69
Kabupaten Wonosobo	63.9	64.7	65.7	66.9	67.6
Kota Magelang	70.2	73.0	71.7	74.5	74.7
Kota Pekalongan	65.9	68.2	69	71.4	71.9
Kota Salatiga	71.5	72.8	72.9	74.4	74.8
Kota Semarang	70.2	73.6	72.8	74.9	75.3
Kota Surakarta	70.5	73.0	72.5	75.8	76
Kota Tegal	65.3	68.5	69.1	71.2	71.4

Sumber: *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Tahun 2001-2008.*
 BPS. 2009.

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian dengan Uji Regresi

<i>Regression Statistic</i>								
<i>Multiple R</i>	0.234318608							
<i>R Square</i>	0.05490521							
<i>Adjusted R Square</i>	0.043915736							
<i>Standard Error</i>	3.19143249							
<i>Observations</i>	175							
ANOVA								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
<i>Regression</i>	2	101.7742618	50.88713089	4.996163489	0.007778247			
<i>Residual</i>	172	1751.86151	10.18524134					
<i>Total</i>	174	1853.635771						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
<i>Intercept</i>	68.07034583	0.515799231	131.9706229	8.9529E-175	67.05223442	69.08845724	67.05223442	69.08845724
<i>X Variable 1</i>	-1.35478E-07	9.76231E-06	-0.013877646	0.988943679	-1.94048E-05	1.91339E-05	-1.94048E-05	1.91339E-05
<i>X Variable 2</i>	-3.461668072	1.139694674	-3.037364436	0.002758492	-5.711256833	-1.212079311	-5.711256833	-1.212079311

Sumber: Tabel 2, Tabel 7, dan Tabel 8. Data diolah.

Tabel 10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian dengan Uji Regresi

Hipotesis	T test dan F test	P value	Pengujian
H1	-0.013877646 (t test)	0.988943679	tidak signifikan
H2	-3.037364436 (t test)	0.002758492	signifikan (*)
H3	4.996163489 (F test)	0.007778247	signifikan (*)

Sumber: Tabel 9.

Keterangan: (*) signifikan pada $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan Tabel 9 dapat diringkas hasil pengujian hipotesis penelitian dengan uji Regresi seperti yang nampak pada Tabel 10 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 10 nampak nilai t test H1 adalah -0.013877646 dengan nilai P value = 0.988943679,

tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa belanja modal pada APBD berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditolak. Nilai t test H2 adalah -3.037364436 dengan nilai

P value = 0.002758492, signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Nilai t test H_3 adalah 4.996163489 dengan nilai P value = 0.007778247, signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima.

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa belanja modal pada APBD berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditolak. Tidak berpengaruhnya belanja modal pada APBD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah jelas merugikan masyarakat karena belanja modal yang sebagian didanai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata pemanfaatannya tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa Belanja Modal sebagai komponen Belanja Pembangunan pada Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah seharusnya mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia. Penyebab tidak berpengaruhnya belanja modal pada APBD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena: 1) Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, antarpemerintah provinsi, antara pemerintah kabupaten dan kota, antarpemerintah kabupaten, dan antarpemerintah kota. Semenjak

pemberlakuan otonomi daerah, kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat) apalagi ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang sama dengan Partai Politik yang mengusung Presiden terpilih sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dari pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah; 2) Tidak cermatnya pengalokasian belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan untuk sumber pendanaan pembangunan daerah. Belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah. Belanja modal hendaknya juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata (mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi) dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil temuan ini mendukung penelitian Prud'Homme Remy (1994), Adi (2005), Suryanto (2005), serta Suhendra dan Hidayat Amir (2006).

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Hal ini dapat dimengerti karena pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat akan ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai Indikator Pembangunan Manusia (IPM) (Arsyad, 2004:38).

PDRB merupakan jumlah nilai produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif dalam suatu perekonomian selama 1 (satu) tahun. Artinya, PDRB menunjukkan nilai produk dari 9 (sembilan) sektor produktif maupun menunjukkan nilai dari pengeluaran para pelaku ekonomi yang beraktivitas di Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, dalam PDRB terkandung kegiatan ekonomi yang lebih luas

daripada sekedar aktivitas pemerintah daerah kabupaten/kota saja sehingga secara teori dapat dijelaskan bahwa peranan masyarakat luas ditambah aktivitas pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini nampak pada Tabel 8 yang menunjukkan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2001-2005 cenderung meningkat khususnya tahun 2005. Hasil temuan ini mendukung penelitian Sasana (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah di sepanjang tahun 2001-2005.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Hal ini dapat dimengerti karena belanja modal pada APBD sekalipun secara individu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, namun ketika bersama-sama dengan dengan pertumbuhan ekonomi ternyata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PDRB merupakan jumlah nilai produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif dalam suatu perekonomian selama 1 (satu) tahun. Artinya, PDRB menunjukkan nilai produk dari 9 (sembilan) sektor produktif maupun menunjukkan nilai dari pengeluaran para pelaku ekonomi yang beraktivitas di Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, dalam PDRB terkandung kegiatan ekonomi yang lebih luas daripada sekedar aktivitas pemerintah daerah kabupaten/kota saja yang ditunjukkan dengan besarnya belanja modal yang digunakan pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat akan ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan, dan menjadi lebih sejahtera seperti yang

ditunjukkan pada Tabel 8 tentang Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hasil temuan ini mendukung penelitian Sasana (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal (diproksi dengan belanja modal) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah di sepanjang tahun 2001-2005.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Belanja modal pada APBD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung penelitian Prud'Homme Remy (1994), Adi (2005), Suryanto (2005), serta Suhendra dan Hidayat Amir (2006); 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung penelitian Sasana (2009); dan 3) Belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung penelitian Sasana (2009).

Saran

Oleh karena berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa belanja modal pada APBD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini jelas merugikan masyarakat karena belanja modal yang sebagian didanai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata pemanfaatannya tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, beberapa saran untuk Pemerintah perlu disampaikan sebagai berikut: 1) Perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, antarpemerintah provinsi, antara

pemerintah kabupaten dan kota, antarpemerintah kabupaten, dan antarpemerintah kota. Saran ini disampaikan karena semenjak pemberlakuan otonomi daerah, kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat) apalagi ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang sama dengan Partai Politik yang mengusung Presiden terpilih sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dari pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah; 2) Alokasi belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan harus dilakukan secara cermat. Belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah. Belanja modal hendaknya juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata (mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi) dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Asmara, JA.. 2007. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2007:19-31.
- Adi, Priyo Hari. 2005. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali". *Jurnal Interdisipliner Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Arsyad, Lincoln, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2003-2004*. Jakarta.
- _____. 2005. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005*. Jakarta.
- _____. 2006. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2006*. Jakarta.
- _____. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. 2001-2007. Jakarta.
- _____. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*. 2003-2007. Jakarta.
- Bank Dunia, (2005), "Analisis Pengeluaran Publik Papua: Sebuah Tinjauan Umum Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Wilayah Tertinggal di Indonesia". *Download* dari www.papua.go.id tanggal 28 Juli 2010.
- Bhal, Roy. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. A Paper Prepared for International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute. Taiwan.
- Cooper, Donald R. and C. William Emory. 1996. *Business Research Methods*. 5th ed. Chicago: Richard D. Irwin.
- Fuad, Noor dkk. 2005. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan. (LPKPAP). Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Jin, Jing and Heng-Fu Zou. 2000. *Fiscal Decentralization and Economics Growth in China*.
- Kompas. *Otonomi Daerah: 80 Persen Daerah Pemekaran Gagal*. 30 September 2009.
- _____. *Moratorium Pemekaran*. 16 Juli 2010.
- _____. *Mekarnya Korupsi Daerah Pemekaran*. 2

- Agustus 2010.
- _____. *Satu Tersangka Setiap Pekan*. 18. Januari 2011.
- _____. *Aceh sampai Papua Rersandera Korupsi*. 24 Januari 2011.
- Mangkoesoebroto Guritno. 1988. *Ekonomi Publik I: Suatu Analisis Teoritis*. Pusat Antar Universitas: Studi Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Oates, Wallace E. 1993. "Fiscal Decentralization and Economic Development". *National Tax Journal*. Vol. 46. No. 2, Juni 1993: 237-243.
- Parhah, Siti. 2002. *Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Data Cross-Section Tahun 2002*.
- Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Murai Kencana PT RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
- Prud'Homme Remy. 1994. *On Dangers of Decentralization*. The Transport Division, Transportation, Water, and Urban Development Department. Pebruari 1994. Washington.
- Sasana, Hadi. 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10, No.1, Juni 2009:103 – 124.
- Sekretariat Negara. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1995), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soesilowati, Endang Sri, dkk., 2005, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Subiyakto, Haryono. 2004. *Praktikum Statistika dengan Microsoft Excel for Windows*. BP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Suhab, Sultan. 2004. "Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah". *Analisis*. Vol. 1, No. 2. 2004:106-114.
- Suhendra, Maman and Hidayat Amir. 2006. "Fiscal Decentralization in Indonesia: Current Status and Future Challenges". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 3. No. 1, September 2006:1-26.
- Sukanto, Reksohadiprojjo. 2001. *Ekonomi Publik*. UGM. Yogyakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suryanto, Joko dkk. 2005. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kajian Teori dan Aplikasi Anggaran*. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.